

PENGARUH PDRB PER KAPITA, BELANJA DAERAH, RASIO KETERGANTUNGAN, KEMISKINAN, DAN TEKNOLOGI TERHADAP IPM DI INDONESIA

Santi Hidayat^{1*}, Nenik Woyanti¹

¹Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Email Corresponding: santi.hidayat98@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan manusia merupakan suatu proses dalam peningkatan kemampuan dasar manusia melalui berbagai upaya untuk kesejahteraan manusia. Tujuan pembangunan manusia adalah agar manusia dapat berpartisipasi disegala bidang pembangunan. Salah satu tolak ukur pembangunan manusia dapat dinilai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPM. Adapun faktor-faktor yang terpilih sebagai variabel dalam penelitian ini: PDRB per kapita, belanja daerah, rasio ketergantungan, kemiskinan, dan teknologi. Dalam penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data *time series* selama 6 tahun, mulai dari tahun 2014 hingga 2019 dan data *cross section* yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, 2) Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, 3) Rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, 4) Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dan 5) Teknologi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Oleh karena itu, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan penduduk mampu menjadi penggerak perekonomian nasional sehingga harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi terutama untuk peningkatan kesejahteraan nasional melalui investasi sumber daya manusia.

Kata Kunci: IPM, PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Kemiskinan, dan Teknologi.

ABSTRACT

Human development is a process of increasing basic human abilities through various steps for human welfare. The purpose of human development is people can participate in all sectors of development. One of measurement of human development can be assessed from the Human Development Index (HDI). Therefore, this research aimed to analyze the factors that influence the HDI. The factors that are chosen as variables in this research: GRDP per capita, regional expenditure, dependency ratio, poverty, and technology. In this research, using secondary data which is panel data consisting of time series data for 6 years, starting from 2014 to 2019 and cross section data from 34 provinces in Indonesia. The analytical tool used in this research is a panel data regression. The results of this research indicate that: 1) GRDP per capita has a positive and significant effect on the HDI, 2) Regional expenditure has a positive and significant effect on the HDI, 3) The dependency ratio has a negative and significant effect on the HDI, 4) Poverty has an effect negative and significant effect on the HDI, and 5) Technology has a negative and significant effect on the HDI. Therefore, the existence of a high population density in Indonesia needs to be balanced with efforts to improve the quality of human resources. This is because the population is able to improve the national economy. So that it must be used optimally by the government to be able to increase economic development, especially to increase national welfare through investment in human resources.

Keywords: HDI, GRDP Per Capita, Regional Expenditure, Poverty, and Technology.

PENDAHULUAN

Pembangunan dapat dirumuskan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil akhir tertentu yang berguna bagi masyarakat luas dengan mengkombinasikan berbagai penggunaan sumber daya. Pembangunan yang sedang menjadi fokus pada saat ini adalah pembangunan ekonomi diikuti dengan pembangunan manusia, atau dengan kata lain

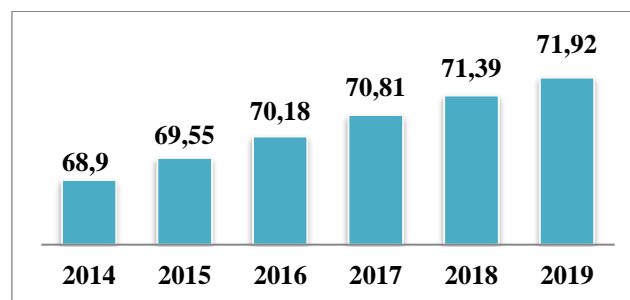
menggunakan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan melalui peningkatan kualitas diri. Salah satu tolak ukur dari pembangunan manusia adalah IPM (IPM).

IPM diperkenalkan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga faktor utama yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan 4 komponen, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta besarnya pengeluaran masyarakat untuk mengonsumsi sejumlah kebutuhan pokok yaitu pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan hidup yang layak.

Badan Pusat Statistik (2019) menjelaskan pembangunan manusia memiliki 2 sisi yang saling mendukung, yaitu pembentukan kapasitas manusia dan pemanfatannya. Pembentukan kapabilitas manusia mencakup upaya peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi, sedangkan pemanfatannya mencakup penggunaan kapabilitas yang dimiliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Kedua sisi tersebut idealnya terbangun secara seimbang agar capaian pembangunan pembangunan manusia menjadi optimum dan berkesinambungan.

Perhitungan IPM yang dinilai penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia serta dapat menentukan peringkat pembangunan suatu daerah atau negara dengan didasari oleh komponen yang mendukung peningkatan IPM. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia tentu memiliki peran yang sangat penting sebagai *agent of change* yang tentu apabila kualitas sumber daya manusia baik maka diharapkan akan membawa perubahan suatu negara ke arah yang lebih baik pula.

IPM di Indonesia cenderung mengalami peningkatan mulai dari tahun 2014 hingga 2019. Berdasarkan laporan data UNDP tahun 2019, nilai IPM di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 0,718 dan berada pada peringkat 107 dari kurang lebih 189 negara dan wilayah. Nilai IPM Indonesia cenderung meningkat sebesar 0,011 apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang berada di peringkat 111. Apabila dibandingkan pada saat awal diperkenalkannya konsep IPM ditahun 1990, nilai IPM Indonesia pada tahun 1990 adalah sebesar 0,525 yang artinya nilai IPM Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,193 hingga tahun 2019.



Gambar 1. Nilai IPM Indonesia, 2014-2019 (Indeks)
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014-2019, (diolah)

Gambar 1. menunjukkan bahwa secara nasional nilai IPM Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Dimulai dari tahun 2014, IPM Indonesia sebesar 68,9 hingga pada tahun 2019 nilai IPM sebesar 71,92. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Indonesia. Ditahun 2019, nilai IPM Indonesia tumbuh

sebesar 0,53 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami pertumbuhan, akan tetapi capaian ini lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ditahun-tahun sebelumnya.

Dalam indikator standar hidup layak, besaran pendapatan tentu akan mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka akan semakin besar pula tingkat pengeluarannya sehingga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidup. Apabila tingkat kesejahteraan meningkat dikarenakan peningkatan pendapatan, maka capaian IPM juga akan meningkat. Hudoyo dan Mahmud (2014) besaran pendapatan suatu masyarakat dapat digambarkan melalui PDRB per kapita. PDRB per kapita juga dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu wilayah, maka akan mencerminkan adanya peningkatan perekonomian masyarakat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memperoleh pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat mampu memeratakan proses pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah juga berperan dalam upaya peningkatan IPM. Pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam APBD sebagai belanja daerah tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang sesuai dengan kemampuan pendapatannya, sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor terutama yang berfokus pada peningkatan pembangunan manusia.

Selain dari sisi anggaran terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas pembangunan manusia, yaitu rasio ketergantungan masyarakat. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami fenomena bonus demografi atau peningkatan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Maryati (2015) berkaitan dengan hal tersebut, bonus demografi juga tidak membawa dampak signifikan jika minimnya investasi sumber daya manusia, karena dapat menimbulkan masalah sosial yang lain. Tetapi, tentu terdapat prasyarat yang harus dipenuhi agar bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut, yaitu kualitas sumber daya manusia yang memadai dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, penduduk usia produktif yang besar tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia dalam sebuah perekonomian maka akan menjadi beban ekonomi karena penduduk usia produktif tersebut tidak memiliki pendapatan tetap dan kemudian akan menimbulkan kemiskinan.

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia dan kemiskinan menjadi besar hingga pada akhirnya target capaian nilai IPM yang ditentukan oleh pemerintah tidak terealisasikan dengan baik.

Seiring dengan perkembangan zaman, tentu masalah sosial ekonomi telah menjadi masalah umum yang memang menjadi hambatan dalam pembangunan nasional terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat juga akan mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Kemajuan teknologi dianggap sebagai faktor penting dan menentukan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu perkembangan teknologi yang hingga saat ini sudah menjangkau hampir seluruh aktivitas manusia adalah internet. Terlepas dari dampak yang ditimbulkan internet, internet telah membawa kemudahan bagi para penggunanya dalam

memperoleh informasi. Selain itu, berkat kecanggihan internet penggunaannya bahkan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pribadi saja, melainkan pemerintahan, organisasi, lembaga, karena penggunaan internet dinilai lebih praktis dan efisien. Sehingga dari fenomena tersebut, internet telah memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan dan budaya masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (PDRB per kapita, belanja daerah, rasio ketergantungan, kemiskinan, dan teknologi) terhadap variabel dependen (IPM) serta untuk mengetahui variabel dalam penelitian ini yang memberikan pengaruh terbesar dalam peningkatan IPM di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Indeks Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik (2014) pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan pada masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, terdapat 3 pilihan paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dapat dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses.

Pembangunan manusia memiliki 2 sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang dimiliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik.

Pada tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) menerbitkan laporan untuk menanggapi isu yang sedang berkembang pada saat itu. Dalam laporan yang diterbitkan dengan judul *Human Development Report (HDR) 1990*, UNDP menegaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Badan Pusat Statistik (2019) IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup : 1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), 2) Pengetahuan (*knowledge*), 3) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh komponen angka harapan hidup. Pentingnya harapan hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor tidak langsung yang berkaitan erat dengan harapan hidup (seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik).

Pada dimensi pengetahuan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan untuk kehidupan produktif dalam masyarakat modern. Harapan lama sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Dimensi ketiga dari pembangunan manusia adalah penguasaan sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebagai komponen dimensi ini. Akan tetapi, mengingat tidak semua wilayah di Indonesia memiliki indikator tersebut, maka dipilih alternatif lain dengan memanfaatkan komponen pengeluaran per kapita disesuaikan.

PDRB Per Kapita

Badan Pusat Statistik (2016) yang dimaksud dengan PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Terdapat 2 cara dalam penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Tarigan (2005:21) pendapatan per kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk. Akan tetapi, angka ini seringkali tidak diperoleh sehingga diganti dengan total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Angka pendapatan per kapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun harga konstan tergantung pada kebutuhan.

Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Rasio Ketergantungan

Pratowo (2012) rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun, ditambah dengan penduduk usia 65 tahun ke atas (keduanya disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Angka ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase angka ketergantungan, maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif. Sedangkan persentase angka ketergantungan rendah, maka akan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif.

Kemiskinan

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Badan Pusat Statistik (2005) menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Wiradyatmika & Sudiana (2019) dengan menggunakan batasan kualitas dan material, kemiskinan diartikan ketidakmampuan untuk meraih standar hidup minimal. Dalam arti yang luas, kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi tidak sebatas pada belum dapat

memenuhi kebutuhan dasar, namun juga secara umum belum dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan tidak memandang dari jenis kelamin, tetapi siapapun individu pasti mempunyai kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang menyertainya.

Teknologi

Wahyuningsih (2013) menjelaskan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diartikan sebagai seluruh peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK terdiri dari 2 aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi sendiri merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke lainnya. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Perkembangan peradaban manusia pada dasarnya diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Al-Mursyid (2019) teknologi informasi telah menjadi katalis dalam pertumbuhan ekonomi, yang dapat dilihat dari meluasnya penggunaan aplikasi yang berdampak pada proses yang lebih efisien dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Oleh karena itu kemajuan teknologi informasi dapat membawa dampak positif dalam berbagai bidang.

Penelitian Sebelumnya

PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka akan semakin besar pula pendapatan masyarakat daerah. Hal ini dikarenakan PDRB yang dihitung menjadi PDRB per kapita merefleksikan pendapatan per kapita. Tingginya PDRB per kapita juga mencerminkan perolehan pendapatan yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya pendapatan per kapita mencerminkan tingkat daya beli penduduk di suatu daerah, dengan itu semakin besarnya pendapatan maka akan semakin besar juga pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap capaian nilai IPM. Sehingga, apabila PDRB per kapita mengalami peningkatan maka penambahannya juga akan meningkatkan IPM (Larasati, 2018).

Alokasi belanja daerah tentu akan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Hal ini kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar mampu mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerah untuk dialokasikan sebagai belanja daerah secara maksimal dengan efektif dan efisien agar mampu melakukan pembiayaan secara mandiri kegiatan pembangunan di daerahnya. Sehingga, pemerintah dapat melakukan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas pembangunannya, terutama dalam hal ini pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dari aspek pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan hidup. Sehingga, apabila alokasi belanja daerah meningkat, maka kualitas pembangunan manusia juga akan meningkat (Sarkoro dan Zulfikar, 2016).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia. Salah satunya yaitu dapat dilihat melalui angka rasio ketergantungan di masyarakat. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan, menunjukkan bahwa jumlah beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif semakin tinggi untuk membiayai hidup penduduk usia tidak produktif. Pratowo (2012) mengemukakan bahwa apabila jumlah angka rasio ketergantungan rendah, maka kualitas pembangunan manusia akan meningkat. Begitu juga

sebaliknya, apabila angka rasio ketergantungan tinggi maka akan menyebabkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif sehingga akan menyebabkan penurunan kualitas pembangunan manusia.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang tidak hanya bertumpu seputar faktor ekonomi saja, faktor non ekonomi juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk yang miskin cenderung memiliki kemampuan daya beli yang rendah sehingga standar kesejahteraan hidupnya tidak dapat terpenuhi. Kemiskinan menyebabkan seseorang memiliki standar hidup yang rendah dapat berpengaruh buruk terhadap kualitas pembangunan manusia dan bahkan dapat menurunkan capaian nilai IPM. Tarumingkeng, dkk (2018) mengemukakan apabila tingkat kemiskinan rendah atau menurun maka capaian nilai IPM akan meningkat, dan sebaliknya apabila tingkat kemiskinan mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi capaian nilai IPM yang semakin menurun.

Seiring dengan perkembangan zaman, peran teknologi tentu tak dapat dipisahkan dari aktivitas perkembangan manusia. Dengan adanya teknologi, aktivitas kehidupan manusia seperti dipermudah. Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga akan mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Kemajuan teknologi dianggap sebagai faktor penting dan menentukan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, seperti salah satunya adanya penggunaan internet. Apabila pemanfaatan internet telah semakin banyak dijangkau oleh masyarakat luas di Indonesia, sehingga dapat menyebabkan masyarakat dapat berkembang menjadi kelompok masyarakat yang maju dan berwawasan sehingga dapat mempengaruhi proses peningkatan pembangunan manusia. Pradono (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan internet di Indonesia memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) PDRB per kapita diduga berpengaruh positif terhadap IPM, 2) Belanja daerah diduga berpengaruh positif terhadap IPM, 3) Rasio ketergantungan diduga berpengaruh negatif terhadap IPM, 4) Kemiskinan diduga berpengaruh negatif terhadap IPM, dan 5) Teknologi diduga berpengaruh positif terhadap IPM.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang menganalisis suatu variabel yang datanya dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan, dan Teknologi terhadap IPM di Indonesia tahun 2014-2019.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Indonesia mulai dari tahun 2014 sampai 2019. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2021.

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah nilai IPM di Indonesia tahun 2014-2019 sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan, dan Teknologi dalam rentang waktu 2014-2019 dari 34 provinsi di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder. Populasi penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia, yang berjumlah 34 provinsi. Sedangkan periode waktu penelitian adalah mulai tahun 2014 hingga 2019 dengan jumlah keseluruhan 204 unit observasi.

Dalam penelitian ini variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi PDRB Per Kapita (Y), Belanja Daerah (BD), Rasio Ketergantungan (RK), Kemiskinan (K), dan Teknologi (T). Sedangkan variabel dependen adalah IPM (IPM). Adapun data diperoleh melalui publikasi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan model regresi data panel, yang merupakan gabungan dari data silang (*cross section*) dan data runtut waktu (*time series*) yang terdapat 3 kemungkinan model regresi yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut.

Common Effect Model

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section*. Pada model ini, tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS).

Fixed Effect Model

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepanya. Untuk mengestimasi data panel model *fixed effect* menggunakan *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

Random Effect Model

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *random effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dikarenakan estimasi data panel memiliki tiga estimasi model seperti yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan langkah untuk memilih model yang terbaik diantara ketiga model tersebut, model yang paling baik menjelaskan hubungan variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini.

Uji Chow

Uji Chow merupakan uji untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model* untuk mengestimasi data panel.

H_0 : *Common Effect Model* lebih baik dari pada *Fixed Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model* lebih baik dari pada *Common Effect Model*

α : 0.05

Apabila hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 0.05, maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model* dan H_0 diterima. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0.05, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*, sehingga H_1 diterima.

Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* untuk mengestimasi data panel. Oleh karena itu, hipotesis dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut.

H_0 : *Random Effect Model* lebih baik dari pada *Fixed Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model* lebih baik dari pada *Random Effect Model*

α : 0.05

Apabila hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 0.05, maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model* dan H_0 diterima. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0.05, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*, sehingga H_1 diterima.

Metode Regresi Data Panel

Selanjutnya beberapa variabel dalam penelitian ini ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma. Transformasi data ke dalam bentuk logaritma dapat digunakan ketika data yang pada awalnya tidak berdistribusi normal menjadi atau mendekati distribusi normal, sehingga bentuk persamaannya sebagai berikut.

$$IPM_{it} = \beta_0 + \text{LOG}\beta_1 Y_{it} + \text{LOG}\beta_2 BD_{it} + \beta_3 RK_{it} + \text{LOG}\beta_4 K_{it} + \beta_5 T_{it} + e_{it} \dots \quad (1)$$

Keterangan :

IPM	= IPM (indeks)
t	= Tahun yang diteliti 2014-2019
i	= Provinsi
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$	= Koefisien regresi masing-masing variabel
Y	= Jumlah PDRB Per Kapita (ribu rupiah)
BD	= Jumlah Belanja Daerah (ribu rupiah)
RK	= Rasio Ketergantungan (persen)
K	= Jumlah Kemiskinan (ribu jiwa)
T	= Jumlah Pengguna Internet (persen)
e	= error

Uji Asumsi Klasik

Apabila model telah ditentukan, maka selanjutnya melakukan uji asumsi klasik. Pengujian ini bertujuan agar model bersifat atau memenuhi syarat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*).

Uji Normalitas

Uji yang dilakukan dengan pengambilan keputusan *Jarque-Bera test* atau *J-B test* yaitu apabila nilai probabilitas lebih dari 0.05, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

Deteksi Multikolinieritas

Gujarati (2006) jika koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari 0.8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai koefisien kurang dari 0.8 maka model bebas dari masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi yang dilakukan, terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual antar pengamatan tetap, maka kondisi ini disebut homoskedastis. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut heteroskedastis. Model regresi yang baik adalah model homokedastis.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi, dapat digunakan Uji *Durbin-Watson* (DW), dengan membandingkan nilai DW hitung (d) dengan nilai DW tabel (du) dan batas bawah (dL).

Uji Signifikansi Variabel

Langkah pengujian data panel selanjutnya adalah dengan melakukan pengujian 3 jenis uji statistik, yaitu Koefisien Determinasi (R^2), Uji Signifikansi Smultan (Uji F), dan Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik).

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengukur kesetaraan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen terhadap suatu himpunan dari hasil pengamatan yang disebut koefisien determinasi atau R^2 . Nilai R^2 digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai R^2 diantara 0 hingga 1, jika nilai R^2 semakin mendekati 1, maka pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen akan semakin besar.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian variabel yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t merupakan pengujian dari variabel-variabel independen yang dilakukan secara individu. Tujuan dari dilakukannya pengujian ini adalah untuk mengetahui tingkat signifikansi dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel indeenden terhadap variabel dependen menggunakan analisis regresi data panel. Tahapana analisis dilakukan dengan melakukan pemilihan model estimasi yang bertujuan untuk mengetahui model yang tepat untuk melakukan regresi data panel.

Berdasarkan hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.000 atau lebih kecil dari nilai α sebesar 0.05, maka kesimpulan Uji Chow adalah menolak H_0 , sehingga *Fixed Effect Model* lebih baik digunakan pada penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: MODEL_FEM			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
	906.85845		
Cross-section F	3	(33,165)	0.0000

Sumber : Hasil olah data Eviews 9, 2021

Sedangkan berdasarkan hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.000 atau lebih kecil dari nilai α sebesar 0.05, maka kesimpulan dari Uji Hausman adalah menolak H_0 , sehingga *Fixed Effect Model* lebih baik digunakan pada penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODEL_REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	96.690425	5	0.0000

Sumber : Hasil olah data Eviews 9, 2021

Berkaitan dengan model regresi data panel yang telah terpilih berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, dapat diketahui bahwa model estimasi yang tepat pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Penelitian ini dilakukan dengan pembobotan *Generalized Least Squares (GLS)* dengan *Fixed Effect Model*. Pembobotan GLS dilakukan karena terdeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dapat diabaikan karena adanya pembobotan GLS. Hal itu dikarenakan karena GLS memproduksi BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) (Gujarati, 2006).

Tabel 3. Hasil Regresi *Fixed Effect Model*
Dependent Variable: IPM
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 10/06/21 Time: 22:18
Sample: 2014 2019
Periods included: 6
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 204
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.92282	5.280666	3.015306	0.0030
LOG_Y_	11.20173	1.056729	10.60038	0.0000
LOG_BD_	2.135720	0.393386	5.429067	0.0000
RK	-0.434615	0.025244	-17.21632	0.0000
LOG_K_	-1.822516	0.429665	-4.241715	0.0000
T	0.038159	0.002873	13.28391	0.0000

Sumber : Hasil olah data Eviews 9, 2021

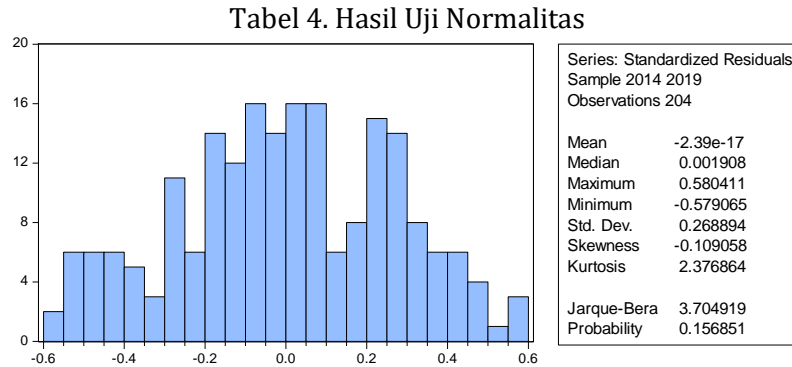
Uji Asumsi Klasik

Apabila model telah ditentukan, maka selanjutnya melakukan uji ausmsi klasik. Pengujian ini bertujuan agar model bersifat atau memenuhi syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Berkaitan dengan metode estimasi yang digunakan adalah GLS, maka asumsi klasik yang harus dipenuhi hanya uji normalitas dan deteksi multikolinieritas.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai residual model regresi berdistribusi normal. Hal itu dikarenakan nilai probabilitas Jarque-Bera adalah sebesar 0.156851 atau *nilai prbabilitas J-B test* lebih besar dari nilai α sebesar 0.05 sehingga asumsi hasil berdistribusi normal terpenuhi.



Sumber : Hasil olah data Eviews 9, 2021

Deteksi Multikolinieritas

Berdasarkan hasil deteksi multikolinieritas, diketahui bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dikarenakan nilai korelasi antar variabel independen tidak ada yang melebihi 0.8.

Tabel 5. Hasil Deteksi Multikolinieritas

	LOG_Y_	LOG_BD_	RK	LOG_K_	T
LOG_Y_	1.000000	0.214062	-0.566479	-0.225853	0.524197
LOG_BD_	0.214062	1.000000	-0.159161	0.760292	0.193265
RK	-0.566479	-0.159161	1.000000	0.040879	-0.470031
LOG_K_	-0.225853	0.760292	0.040879	1.000000	-0.070002
T	0.524197	0.193265	-0.470031	-0.070002	1.000000

Sumber : Hasil olah data Eviews 9, 2021

Uji Signifikansi Variabel

Koefisien Determinasi (R²)

Dari hasil regresi yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai R-squared adalah sebesar 0.998209 yang menunjukkan bahwa 99.82% variabel IPM di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang telah dipilih di dalam model (PDRB per kapita, belanja daerah, rasio ketergantungan, kemiskinan dan teknologi). Sisanya, dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.998209
Adjusted R-squared	0.997796
S.E. of regression	0.298255
F-statistic	2420.004

Prob(F-statistic)	0.000000
-------------------	----------

Sumber : Hasil olah data Eviews 9, 2021

Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan pada Tabel 4.5, diketahui bahwa nilai dari F-statistic adalah sebesar 2420.004 dengan nilai probabilitas 0.000000. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat α sebesar 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (PDRB per kapita, belanja daerah, rasio ketergantungan, kemiskinan, dan teknologi) secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (IPM).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik)

Berdasarkan pada hasil regresi yang telah dilakukan pada Tabel 4.3, pada tingkat signifikansi α sebesar 0.05, diketahui bahwa masing-masing variabel independen (PDRB per kapita, belanja daerah, rasio ketergantungan, kemiskinan, dan teknologi) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (IPM).

Interpretasi Hasil

$$IPM = 15.92282 + 11.20173 \text{ LOG_Y_} + 2.135720 \text{ LOG_BD_} - 0.434615 \text{ RK_} - 1.822516 \text{ LOG_K_} + 0.038159 \text{ T} \quad (2)$$

Interpretasi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen akan dijelaskan dalam pembahasan di bawah ini.

Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap IPM

Hasil estimasi regresi data panel yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel-variabel independen (PDRB per kapita, belanja daerah, rasio ketergantungan, kemiskinan, dan teknologi) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (IPM). Variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM karena nilai prob. = 0.0000 atau lebih kecil dari α sebesar 0.05. Nilai koefisien sebesar 11.20173 menunjukkan arah pengaruhnya positif. Sehingga, ketika PDRB per kapita naik sebesar 1% maka IPM akan naik sebesar 11.20%. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vildzah & Muhammad (2016) serta Larasati (2018) bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Peningkatan pendapatan per kapita akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan IPM, karena dengan semakin meningkatnya pendapatan, maka standar kelayakan hidup yang menggunakan pendapatan sebagai tolak ukur kesejahteraan juga akan meningkat hingga kemudian capaian IPM juga akan mengalami peningkatan

Pengaruh Belanja Daerah terhadap IPM

Variabel belanja daerah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, dikarenakan nilai prob. = 0.0000 atau lebih kecil dari α sebesar 0.05. Nilai koefisien sebesar 2.135720 menunjukkan arah pengaruhnya positif. Sehingga, ketika belanja daerah naik sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM sebesar 2.13%. Seiring dengan peningkatan anggaran belanja daerah di Indonesia, peran dari belanja daerah ini adalah sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah melalui pemerintah daerah yang bersangkutan. Secara spesifik, alokasi anggaran belanja daerah untuk bidang pendidikan dan kesehatan akan menentukan tingginya pencapaian pembangunan manusia sehingga diharapkan peningkatan alokasi anggaran belanja daerah untuk pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan IPM. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priambodo & Noor (2015) serta Marunta (2017) bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Pengaruh Rasio Ketergantungan terhadap IPM

Sementara untuk variabel rasio ketergantungan memiliki hubungan negatif dengan IPM dan berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Hal tersebut diperoleh dari hasil nilai prob. = 0.0000 atau lebih kecil dari α sebesar 0.05. Nilai koefisien sebesar -0.434615 menunjukkan arah

pengaruhnya negatif. Sehingga, ketika rasio ketergantungan naik sebesar 1% maka akan menurunkan IPM sebesar 0.43%. Besaran angka rasio ketergantungan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Bhakti, dkk (2012) semakin besar angka rasio ketergantungan, maka akan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif menanggung penduduk usia tidak produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup. Apabila kebutuhan hidup tidak mampu dipenuhi, maka kesejahteraannya akan berkurang. Namun sebaliknya, jika angka rasio ketergantungan berkurang, maka beban tanggungan penduduk usia produktif juga akan berkurang, sehingga kesejahteraan akan meningkat karena kebutuhan hidup terpenuhi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramono & Soesilowati (2016) serta Pratowo (2012) bahwa rasio ketergantungan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM.

Pengaruh Kemiskinan terhadap IPM

Variabel kemiskinan juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM karena nilai prob. = 0.0000 atau lebih kecil dari α sebesar 0.05. Nilai koefisien sebesar -1.822516 menunjukkan arah pengaruhnya negatif. Sehingga, ketika kemiskinan naik sebesar 1% maka akan menurunkan IPM sebesar 1.82%. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Hal tersebut menjadi gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang diharapkan tidak terealisasi dengan baik (Mirza, 2012). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012) dan Ningrum, dkk (2020) bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa menurunnya tingkat kemiskinan maka akan meningkatkan nilai IPM. Begitu pula sebaliknya, apabila terjadi kenaikan tingkat kemiskinan, maka akan menurunkan capaian nilai IPM.

Pengaruh Teknologi terhadap IPM

Sedangkan variabel teknologi menunjukkan arah pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM karena nilai prob. = 0.0000 atau lebih kecil dari α sebesar 0.05. Nilai koefisien sebesar 0.038159 menunjukkan arah pengaruhnya positif. Sehingga, ketika teknologi naik sebesar 1% maka IPM akan naik sebesar 0.03%. Hal tersebut berarti setiap kenaikan penggunaan teknologi dalam hal ini proporsi orang yang menggunakan internet, maka akan menambah kenaikan pada nilai IPM. Teknologi berperan pada upaya peningkatan kualitas sumber manusia dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman, teknologi sudah merupakan bagian dalam sisi hidup manusia. Hampir seluruh aktivitas yang dilakukan manusia saat ini bersinggungan dengan teknologi. Dengan adanya bantuan teknologi, manusia serasa dipermudah segala aktivitasnya dengan penggunaan waktu yang cenderung lebih singkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Mursyid (2019) dan Pradono (2016) yang menjelaskan bahwa variabel teknologi (internet) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

KESIMPULAN

Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dari hasil analisis regresi data panel bahwa PDRB per kapita, belanja daerah, dan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sedangkan rasio ketergantungan dan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Sementara itu, dapat diketahui pula bahwa PDRB per kapita merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling besar terhadap peningkatan IPM di Indonesia.

Implikasi

Adanya kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang serius melalui pendidikan, kesehatan, dan

penyediaan lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan penduduk mampu menjadi penggerak perekonomian nasional sehingga harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk dapat mendorong pembangunan ekonomi terutama untuk peningkatan kesejahteraan nasional melalui investasi sumber daya manusia. Selanjutnya dalam pelaksanaan era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah perlu untuk diimplementasikan secara efektif dan efisien khususnya yang berkaitan dengan program dan kebijakan untuk meningkatkan IPM di Indonesia. Pentingnya peran masing-masing pemerintah daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya secara maksimal serta mampu melakukan alokasi secara mandiri untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah agar tidak lagi terjadi ketidakmerataan kesejahteraan antar daerah sehingga upaya peningkatan IPM dapat tercapai. Selain itu, agar penduduk mampu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup sehingga mampu meningkatkan capaian nilai IPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mursyid, A. R. (2020). Pengaruh Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 53-66.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Booklet IPM BPS 2014, *Jakarta: BPS Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik, 2020, Booklet IPM BPS 2019, *Jakarta: BPS Indonesia*.
- Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprpto, S. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM di Indonesia Periode 2008-2012. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 18(4), 452-469.
- Gujarati, D. N. (2006). Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 1. *Jakarta: Penerbit Erlangga*.
- Hudoyo, Y. T., & Mahmud, A. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Indonesia, R. (2005). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Lembaran Negara RI Tahun*, 140.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Larasati, D. (2018). *Analisis pengaruh penyaluran dana ZIS, PDRB per kapita, dan kemiskinan terhadap IPM (IPM) di Indonesia Tahun 2013-2016*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018.
- Marunta, R. A. (2017). *Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2007-2016*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Maryati, S. (2015). Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju Bonus Demografi di Indonesia. *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 3(2), 124-136.
- Mirza, D. S. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 4(2).
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212-222.
- Pradono, W. (2016). Dampak Sosial Ekonomi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Perkembangan Teknologi Pitalabar di Indonesia [Social Economy Impact And Local Government Initiative Relating To Broadband Technology Development In Indonesia]. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, 14(2), 131-146.
- Pramono, A. Y., & Soesilowati, E. (2016). Determinan Kualitas Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 5(3), 269-277.
- Pratowo, N. I. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap IPM. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 1(1), 15-31.

Pengaruh PDRB Per Kapita, Belanja Daerah, Rasio Ketergantungan, Kemiskinan, Dan Teknologi Terhadap IPM di Indonesia

- Priambodo, A., & Noor, I. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap IPM (Studi Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2).
- Sarkoro, H., & Zulfikar, Z. (2018). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap IPM (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 54-63.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional. PT Bumi Aksara. Jakarta.*
- Tarumingkeng, W. A., Rimate, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2018). Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan terhadap IPM (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 82-95.
- Vildzah, N., & Muhammad, S. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM di Negara Miskin Asia dan Afrika. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 429-437.
- Wiradyatmika, A. G. A., & Sudiana, I. K. (2013). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(7), 44623.
- Wahyuningsih, S. (2013). Dampak Indeks Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Pertumbuhan Perekonomian. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, 11(4), 335-344.